

ABSTRAK

APRILLIA SAMINO “Analisis Hukum Pemenuhan Hak Pekerja (Studi Kasus Pada Toko Bangunan di Kota Ternate)” (dibimbing oleh Jamal Hi. Arsad, S.H., M.H sebagai pembimbing I dan Dr. Sultan Alwan, S.H., M.H sebagai pembimbing II)

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak dari pekerja pada Toko Bangunan di Kota Ternate. Dan untuk mengetahui implementasi fungsi pengawasan dari Instansi berwenang terhadap pemenuhan hak pekerja di Kota Ternate.

Penelitian ini dilakukan di Kota Ternate. Tipe penelitian adalah empiris dengan menggunakan metode pengumpulan data studi kepustakaan dan studi lapangan. Sumber data yang diperoleh berupa data sekunder dan data primer. Teknis analisis data yang dilakukan adalah metode kualitatif.

Pemenuhan hak-hak pekerja pada beberapa toko bangunan seperti toko bangunan Gambesi Jaya, toko bangunan Rahayu Gypsum, toko bangunan Mitra Utama dan toko bangunan Ud. Dermawan di Kota Ternate berdasarkan hasil observasi dilapangan belum secara keseluruhan belum dipenuhi oleh pihak pemilik toko bangunan. Hak-hak pekerja yang belum dipenuhi tersebut meliputi; hak atas gaji/upah yang sesuai standar minimum, hak atas libur kerja sehari selama (6) hari kerja, hak atas cuti/istirahat kerja, dan hak atas jaminan (BPJS). Dengan demikian tentu tidak sejalan dengan ketentuan yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah didalam Undang-Undang Cipta Kerja mengenai hak-hak pekerja. Peran serta fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dinas ketenagakerjaan kota ternate dalam melindungi hak-hak pekerja telah dilakukan langkah-langkah preventif dengan adanya kegiatan monitoring dan evaluasi ketenagakerjaan, bimbingan teknis pencegahan perselisihan hubungan industrial, sosialisasi peraturan ketenagakerjaan, dan penyelesaian hubungan industrial. Namun dalam upaya perlindungan represif berupa tindakan penyelesaian belum efektif oleh karena sejak tahun 2017 telah dilimpahkan kewenangannya kepada Dinas Ketenagakerjaan Provinsi. Hal ini dinilai kurang efesien sebab yang seharusnya memiliki kewenangan dalam bentuk penerapan sanksi seharusnya berada pada instansi daerah sehingga setiap kendala maupun penyalahgunaan hak-hak dapat secara cepat dilakukan tindakan langsung oleh dinas ketenagakerjaan yang berada di tingkat Kabupaten/Kota.

Kata kunci : *Pemenuhan-Hak-Pekerja*

ABSTRACT

APRILLIA SAMINO “*Legal Analysis of Fulfillment of Workers’ Rights (Case Study of Building Material Stores in Ternate City)*” (supervised by Jamal Hi. Arsad, S.H., M.H as Supervisor I and Dr. Sultan Alwan, S.H., M.H as Supervisor II)

This study aims to determine the implementation of fulfillment of workers’ rights in Building Material Stores in Ternate City. And to determine the implementation of the supervisory function of the authorized agency towards the fulfillment of workers’ rights in Ternate City. This research was conducted in Ternate City.

The type of research is empirical using data collection methods of literature studies and field studies. The data sources obtained are in the form of secondary data and primary data. The technical analysis of the data used is a qualitative method.

Fulfillment of workers’ rights in several building materials stores such as Gambesi Jaya building materials store, Rahayu Gypsum building materials store, Mitra Utama building materials store and Ud. Dermawan building materials store in Ternate City based on field observations has not been fully fulfilled by the building materials store owners. The workers’ rights that have not been fulfilled include; the right to a salary/wage that meets the minimum standard, the right to a day off for (6) working days, the right to leave/rest, and the right to insurance (BPJS). Thus, it is certainly not in line with the provisions stipulated in Law Number 13 of 2003 concerning Manpower as amended in the Job Creation Law concerning workers' rights. The role and function of supervision carried out by the Ternate City Manpower Office in protecting workers' rights has taken preventive steps with the existence of monitoring and evaluation activities for manpower, technical guidance for preventing industrial relations disputes, socialization of manpower regulations, and settlement of industrial relations. However, in efforts to protect repressively in the form of settlement actions, it has not been effective because since 2017 its authority has been delegated to the Provincial Manpower Office. This is considered inefficient because the authority in the form of imposing sanctions should be in the hands of regional agencies so that any obstacles or abuse of rights can be quickly and directly acted upon by the manpower office at the Regency/City level.

Keywords: *Fulfillment-of-Workers'-Rights*